



Perluakah Posisi *Internasional Monetary Fund* (IMF) Mendukung Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang?

Muhammad Ridwan^{1*}, Dies Nurhayati², Yulia Nor Frassiska³, Ninik Sudarwati⁴

^{1,2,3} Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

⁴ Universitas PGRI Jombang, Indonesia

*Corresponding author: mridwan.y2002@gmail.com

Abstract: This article discusses the role of developing economies supported by the International Monetary Fund (IMF). In the era of globalization, developing countries face challenges such as financial market volatility and resource limitations. The IMF, founded in 1944, plays a key role in providing loans, technical assistance, research, analysis, and surveillance to strengthen the economic policies of its member countries. This article uses a qualitative method by examining sources from various reference journals to understand the impact and criticism of the role of the IMF. The results show that while the IMF has helped developing countries overcome financial crises and boost economic growth, its policies and requirements often exacerbate the conditions of countries in crisis. Despite these criticisms, the IMF continues to play a role in creating global economic stability. This article also reviews the history of the IMF, its short- and long-term policies, and the impact of IMF assistance on several countries. In conclusion, the IMF needs to continue adapting and innovating to support inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: International Monetary Fund (IMF); economic development; developing countries

Abstrak : Artikel ini membahas peran pembangunan ekonomi negara berkembang yang di dukung *International Monetary Fund* (IMF). Di era globalisasi, negara-negara berkembang menghadapi tantangan seperti volatilitas pasar keuangan dan keterbatasan sumber daya. IMF, didirikan pada tahun 1944, berperan penting dalam menyediakan pinjaman, bantuan teknis, penelitian, analisis, dan surveilans untuk memperkuat kebijakan ekonomi negara anggotanya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji sumber dari berbagai jurnal referensi untuk memahami dampak dan kritik terhadap peran IMF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun IMF telah membantu negara-negara berkembang mengatasi krisis keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan dan persyaratannya seringkali dipandang memperburuk kondisi negara yang sedang krisis. Terlepas dari kritik tersebut, IMF terus berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi global. Artikel ini juga mengulas sejarah IMF, kebijakan jangka pendek dan jangka panjangnya, serta dampak bantuan IMF pada beberapa negara. Kesimpulannya, IMF perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Internasional Monetary Fund* (IMF); pembangunan ekonomi; negara berkembang

Copyright (c) 2025 The Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Received: 24-05-2025

Revised: 06-06-2025

Accepted: 07-06-2025

Published: 10-06-2025

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang intens dan dinamis ini, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan kunci masa depan negara. Dalam hal ini, negara-negara berkembang kerap menghadapi berbagai

tantangan, seperti ketidakstabilan pasar keuangan, krisis ekonomi, dan keterbatasan modal. Di sinilah *Internasional Monetary Fund* (IMF) berperan untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.

IMF, didirikan pada tahun 1944, merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 190 negara dengan misi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global, memfasilitasi perdagangan internasional, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota yang terlilit utang atau mempunyai masalah keuangan. Pinjaman ini sering kali disertai dengan persyaratan tertentu, seperti penerapan reformasi ekonomi dan kebijakan fiskal yang hati-hati. Adapun bantuan Teknis: IMF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kebijakan ekonomi, sistem keuangan, dan statistik mereka.

Penelitian dan Analisis: IMF melakukan penelitian dan analisis ekonomi global dan regional untuk membantu negara-negara anggota menetapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Pemantauan: IMF memantau kebijakan ekonomi negara-negara anggota untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dukungan IMF terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang membawa dampak positif. Misalnya, bantuan IMF dalam memerangi krisis keuangan Asia tahun 1997/1998 membantu negara-negara yang terkena dampak krisis ekonomi tersebut pulih dengan cepat dan kembali ke jalur pembangunan.

Beberapa orang berpendapat bahwa sistem pinjaman IMF yang kaku dapat merugikan negara-negara yang berada dalam krisis. Selain itu, IMF telah dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusannya.

Terlepas dari kritik tersebut, IMF terus memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi. Kami berharap penyesuaian dan inovasi lebih lanjut, IMF dapat terus berkontribusi terhadap terciptanya sistem keuangan global yang stabil dan berkeadilan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkesinambungan di seluruh dunia.

METODE

Metode penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode kualitatif yang sumber teksnya berasal dari jurnal yang berbeda melalui kajian literatur. Kemudian peneliti menyadari hal ini dan menyajikan ide-ide berdasarkan bukti tersebut dalam jurnal komprehensif ini. Sebab peneliti ingin menjelaskan lebih jauh mengenai peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam metode penelitian kualitatif mengembangkan realitas dan maknanya. Oleh karena itu peneliti kualitatif lebih tertarik pada proses dan proses. Dalam penelitian

kualitatif, evaluasi penelitian dibatasi waktu dan mencakup sejumlah kecil subjek. Oleh karena itu, analisis tematik umum dapat dilakukan (Densin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif berfokus pada berbagai metode dan oleh karena itu menggunakan berbagai metode untuk menunjukkan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti (Densin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif merupakan unsur kajian pemahaman suatu fenomena untuk menciptakan suatu kerangka yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dari sumber atau secara alami dengan kata-kata (Kharuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode kualitatif yang sumber teksnya berasal dari jurnal yang berbeda. Kemudian peneliti menyadari hal ini dan menyajikan ide-ide berdasarkan bukti tersebut dalam jurnal komprehensif ini. Sebab peneliti ingin menjelaskan lebih jauh mengenai peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam metode penelitian kualitatif mengembangkan realitas dan maknanya. Oleh karena itu peneliti kualitatif lebih tertarik pada proses dan proses.

Dalam penelitian kualitatif, evaluasi penelitian dibatasi waktu dan mencakup sejumlah kecil subjek. Oleh karena itu, analisis tematik umum dapat dilakukan (Densin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif berfokus pada berbagai metode dan oleh karena itu menggunakan berbagai metode untuk menunjukkan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti (Densin dan Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif merupakan unsur kajian pemahaman suatu fenomena untuk menciptakan suatu kerangka yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dari sumber atau secara alami dengan kata-kata (Kharuddin, 2021)

International Monetary Fund (IMF)

Ketika Perang Dunia II berakhir, negara-negara sekali lagi ditanyai bagaimana perekonomian global dapat ditingkatkan selama Perang Bretton Woods mengenai kebijakan moneter dan dasar-dasar hukum ekonomi internasional. Pada pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk turut serta meningkatkan kinerja perekonomian dunia melalui langkah-langkah seperti pengurangan kontrak dan pengembalian nilai-nilai yang dapat menghentikan perdagangan dunia. Memberikan pinjaman konsumen untuk membantu hukum dan sistem keuangan negara asing. Negara-negara dengan masalah keuangan. Kesimpulan dari konferensi tersebut adalah bahwa DPR atau Parlemen dibentuk oleh para anggotanya dan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1947. Jadi Dana Moneter Internasional adalah lembaga warga dunia, sehingga keanggotaannya bisa sekitar. 189 negara (Pamungkas dkk., 2019).

IMF adalah organisasi moneter internasional yang bertindak sebagai salah satu organisasi

ekonomi internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan modal internasional ke semua negara. Tujuan Dana Moneter Internasional adalah untuk menyesuaikan sistem moneter internasional, menjaga nilai tukar, meningkatkan daya beli dan mengelola krisis moneter. Dana Moneter Internasional bertujuan untuk mewakili perekonomian negara secara bersamaan. IMF memiliki pendekatan unik dalam menyelesaikan permasalahan nasional. (Hermawandi, 2019).

IMF, sebuah organisasi multilateral, mengidentifikasi negara-negara yang masih mengalami masalah keuangan. Mencegah ketidakstabilan keuangan untuk melindungi perekonomian regional dan global. IMF adalah badan penasihat yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi suatu negara ketika perekonomiannya berada dalam kondisi buruk. IMF memastikan perekonomian negara-negara anggotanya tidak menyusut. Oleh karena itu, IMF memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan ekonominegara berkembang. Pembiayaan ini ditujukan kepada negara-negara berkembang. Ketika IMF berdiri, anggotanya berjumlah 189 orang, sehingga dengan bergabung dengan IMF, suatu negara secara sukarela menyerahkan sebagian kedaulatan nasionalnya kepada IMF (Tamidi, 2003).

IMF mempunyai pengaruh yang besar terhadap semua negara. IMF memberikan dukungan kepada anggotanya dengan instrumen dan suku bunga yang dapat ditawarkan oleh suatu negara. Fakta bahwa seruan IMF kepada anggotanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi negara-negara. Selain pinjaman, Dana Moneter Internasional memberikan bantuan berkualitas tinggi kepada negara-negara yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis sistem keuangan internasional negara anggota, mengetahui kepentingan perekonomian negara tersebut sehingga dapat mencapai kesejahteraan, dan mengetahui kehidupan perekonomian negara tersebut yang akan ditentukan. Seluruh negara anggota menjadi sasaran utama IMF. IMF bertanggung jawab untuk menganalisis keadaan perekonomian negara guna membuat pedoman yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan untuk menganalisis dan memperbaiki situasi perekonomian di negara tersebut. IMF memang tidak bisa menyelesaikan masalah ini, namun bisa mempererat hubungan antar negara (Aziza et al., 2019).

Sejarah Terbentuknya IMF

Internasional Monetary Fund (IMF) didirikan pada tahun 1944 setelah Konferensi PBB yang diadakan di Bretton Woods, AS. Saat itu, setidaknya ada 45 perwakilan negara yang menyepakati tingkat kerja sama ekonomi. Tujuan kerja sama ekonomi ini adalah untuk mencegah terjadinya depresi besar kedua seperti yang terjadi pada tahun 1930. Pada tahun yang sama, perekonomian banyak negara melemah. Oleh karena itu, negara-negara tersebut mengambil kebijakan pembatasan impor untuk menjaga perekonomiannya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan

kemerosotan perekonomian, dan akhirnya banyak negara yang tidak mampu lagi bertahan.

Karena masalah ini, perwakilan banyak negara datang ke Konferensi Bretton Woods dan membahas syarat-syarat perjanjian. Tujuannya adalah untuk memantau sistem moneter internasional, nilai tukar dan untuk memastikan bahwa pembatasan nilai tukar dihilangkan. Akhirnya pada bulan Desember 1, tepatnya tahun 1945, sebuah organisasi internasional yang kini dikenal dengan nama IMF resmi berdiri. Saat itu, terdapat 29 negara yang menjadi anggota dan penandatanganan perjanjian tersebut.

Kebijakan jangka panjang IMF

Awalnya, strategi pembangunan ekonomi IMF, yang dikenal sebagai ortodoksi, menekankan pengembangan sektor swasta untuk mendorong efisiensi pasar. Namun, strategi ini dikritik oleh para ekonom di luar IMF karena penekanannya yang kuat pada praktik pasar. Kemudian Dana Moneter Internasional mulai fokus pada faktor-faktor non-pasar lainnya: langkah-langkah untuk mengurangi inflasi dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi permintaan, mengendalikan harga, memperbaiki lingkungan politik atau membangun demokrasi, mengurangi atau menghilangkan subsidi pemerintah, dan menunda inflasi. Gaji PNS dipastikan akan dinaikkan tanpa mempengaruhi APBN. Metode ini disebut metode heterodoks. Teori hiperstabilitas mensyaratkan bahwa sistem moneter internasional yang stabil dapat dibangun hanya jika anggota sistem menghormati kebebasan ekonomi. Suatu negara dianggap sebagai anggota sistem yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari layanan Dana Moneter Internasional jika negara tersebut menggunakan standar sukarela.

Menanggapi krisis mata uang Indonesia, strategi awal IMF untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mendorong pemerintah Indonesia melakukan transisi dari ekonomi pasar yang dipaksakan ke sistem keuangan yang lebih terorganisir. Meskipun Indonesia merupakan negara penandatanganan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), IMF menilai Indonesia belum menerapkan prinsip ekonomi pasar secara konsisten. Inkonsistensi ini terlihat pada berbagai rezim perekonomian yang menyimpang dari prinsip pasar.

Untuk mengatasi krisis mata uang Indonesia, langkah pertama IMF adalah mendesak pemerintah Indonesia untuk beralih dari ekonomi pasar yang dipaksakan menuju sistem keuangan yang lebih teratur. Menurut IMF, meskipun Indonesia merupakan negara penandatanganan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia belum secara konsisten menerapkan prinsip ekonomi pasar. Keadaan ini ditandai dengan berbagai rezim perekonomian yang menyimpang dari prinsip pasar. Oleh karena itu, perjanjian yang ditandatangani antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus memuat

perubahan sistem ekonomi pasar yang diinginkan IMF. Salah satu kebijakan penting yang diatur adalah subsidi bahan bakar, yang memerlukan intervensi pemerintah untuk menetapkan harga bahan bakar lokal di bawah harga pasar. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat antara tahun 1990 dan 1993, dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,1 persen per tahun antara tahun 1988 dan 1994, dan inflasi menurun dari 145 persen menjadi 6 persen. Namun, sebagian besar aliran masuk modal asing ke wilayah ini disebabkan oleh campur tangan satu orang saja.

Kebijakan IMF Jangka Pendek

Pinjaman yang dirancang untuk mengatasi masalah pembayaran jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu pendek, yaitu antara 12 hingga 18 bulan, dengan jangka waktu maksimum yang disetujui adalah 3 tahun. Jangka waktu pinjaman ini bervariasi antara 2 tahun 3 bulan hingga 4 tahun, atau 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Biaya yang harus dibayarkan mencakup pokok pinjaman ditambah tambahan pokok sebesar 100 untuk jumlah di atas 200% kuota, dan 300 basis pada 200% kuota. Syarat yang harus dipenuhi adalah anggota harus menyetujui dan menerapkan kebijakan yang menjamin gaji dibayarkan tepat waktu.

Dana tambahan ini memberikan bantuan sementara kepada anggota untuk mencegah masalah pembayaran akibat hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba, dan hanya tersedia sebagai pelengkap bagi lembaga reguler. Fasilitas ini tidak terbatas, hanya tersedia jika menerima dana atau konsolidasi dari perusahaan biasa, yang dapat bertahan lebih dari satu tahun. Jangka waktu pelunasan berkisar antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan, atau 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun.

Kebijakan IMF Jangka Menengah

Bantuan darurat terdiri dari dua jenis. Pertama, bantuan bencana, di mana IMF memberikan bantuan segera dan jangka pendek kepada negara anggota untuk mengatasi masalah pembayaran yang timbul akibat bencana. Kedua, bantuan pasca-konflik, di mana IMF memberikan bantuan darurat jangka menengah untuk menangani krisis upah yang terjadi setelah kerusuhan sipil atau konflik bersenjata lintas batas. Jumlah maksimum bantuan ini adalah 25% dari kuota, namun jumlah yang lebih tinggi dapat diberikan dalam kasus luar biasa. Jangka waktu pelunasan berkisar antara 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Dana ini ditawarkan berdasarkan jumlah pokok tanpa biaya tambahan, dan bantuan subsidi dapat diberikan kepada negara berpendapatan rendah jika sumber daya tersedia.

Tujuan *International Monetary Fund* (IMF)

Meskipun tujuan Piagam IMF telah mengalami perubahan seiring waktu, tujuannya tetap sama seperti saat pertama kali ditetapkan pada tahun 1944:

1. Meningkatkan kerja sama moneter internasional melalui lembaga permanen yang mengelola konsultasi dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah moneter internasional.

2. Memfasilitasi perluasan dan perkembangan perdagangan internasional, yang berkontribusi pada peningkatan dan pemeliharaan tingkat lapangan kerja yang tinggi, pendapatan riil, serta pengembangan sumber daya produktif anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.
3. Meningkatkan dan menjaga stabilitas nilai tukar antar anggota, serta mencegah devaluasi nilai tukar.
4. Memfasilitasi pembentukan sistem pembayaran bilateral untuk perdagangan antar anggota dan menghapus pembatasan devisa yang menghambat perkembangan perdagangan dunia.
5. Memberikan dukungan kepada anggota dengan menyediakan pinjaman, sehingga memungkinkan mereka memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem pembayaran tanpa menghambat pembangunan nasional dan internasional.
6. Memperpendek jangka waktu dan mengurangi ketidakseimbangan sistem pembayaran internasional anggota melalui upaya tersebut.

Negara-negara anggota IMF berkomitmen untuk mengelola nilai tukar dan kebijakan ekonomi demi mendorong stabilitas keuangan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IMF, yang terdiri dari 190 negara, bertujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional di bidang moneter, meningkatkan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan global. IMF menggunakan dana ini untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah keuangan sesuai dengan sistem keuangan internasional, menjamin keamanan, dan menjaga keseimbangan global serta lokal.

Pendanaan negara-negara anggota IMF berasal dari kontribusi keanggotaan atau tinjauan tambahan berkala saat mereka bergabung dengan IMF. Negara menyetor 25% modal saham dalam bentuk retribusi khusus atau modal saham, sementara 75% lainnya dapat dicairkan oleh IMF dalam mata uang negara-negara anggota sesuai kebutuhan mereka. Besaran kontribusi suatu negara menentukan hak suara dan akses pinjaman dari IMF.

Krisis keuangan memberikan peluang bagi negara berkembang untuk melakukan perubahan kebijakan yang radikal, tetapi sering kali mengakibatkan perubahan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara maju. Skala kontribusi mencerminkan ukuran relatif ekonomi global suatu negara: semakin besar output ekonomi dan diversifikasi perdagangan, semakin besar kontribusinya. Amerika Serikat, sebagai ekonomi terbesar dunia, adalah kontributor terbesar IMF dengan 17,26% dari total dana. Sebaliknya, negara-negara anggota lainnya berkontribusi dalam jumlah kecil, bahkan hingga hanya 0,001%. Kuota ini ditinjau secara berkala.

Setiap anggota dapat meminjam lebih dari 25% kuota tahunan dengan maksimum 125% selama

lima tahun. IMF memiliki badan penting seperti Dewan Eksekutif, Dewan Gubernur, dan Direktur Eksekutif. Setiap negara memiliki kursi di dewan ini. Dewan direksi, yang terdiri dari 24 pejabat senior, bertanggung jawab atas pekerjaan IMF, dengan semua wewenang berada di tangan Dewan Pengurus. Dewan direksi mengendalikan aset dan operasi IMF.

Asosiasi Gubernur dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada Ketua Eksekutif. Wewenang yang didelegasikan adalah milik Ketua Dewan Eksekutif:

1. Kekuasaan untuk menerima, menanggukhan atau menolak keanggotaan dan menyetujui perubahan biaya.
2. Kekuasaan untuk mengizinkan perubahan nilai mata uang suatu negara anggota secara simultan atau kekuasaan untuk mendistribusikan pendapatan di antara IMF.
3. Wewenang untuk menentukan penghentian kerja negara-negara anggota IMF

Peran IMF adalah menyediakan dana darurat melalui IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya, menggunakan IMF sebagai referensi. Metode pemberian pinjaman dan kebijakan IMF dijelaskan sebagai berikut:

1. Pinjaman untuk Masalah Neraca Pembayaran Jangka Pendek: Pinjaman ini memiliki durasi antara 12 hingga 18 bulan, dengan maksimum 3 tahun. Jumlah pinjaman maksimal 100% dari kuota tahunan dan total penggunaan dana IMF sebesar 300%. Jangka waktu pinjaman berkisar antara 2 tahun 3 bulan hingga 4 tahun, dan 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Komisi awal dibayarkan, dengan premi sebesar 100 untuk jumlah di atas 200% kuota, dan 300 untuk jumlah di atas 300%. Semua anggota harus menyetujui dan mengikuti instruksi agar masalah pembayaran dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Dukungan Jangka Panjang untuk Perubahan Struktural: Dana ini mendukung perubahan struktural untuk mengatasi masalah upah jangka panjang. Jumlah pinjaman tahunan adalah 100% dari kuota, dengan total 300% dari aset IMF. Durasi pinjaman adalah antara 4 tahun 6 bulan hingga 7 tahun, atau 4 tahun 6 bulan hingga 10 tahun. Premi tambahan sebesar 100 poin untuk tarif 200%, dan 200 poin untuk tarif 300% dikenakan. Anggota harus menyetujui dan melaksanakan rencana strategis tiga tahun serta memberikan informasi strategis tahunan selama dua belas bulan ke depan.
3. Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan: Instrumen ini memberikan dukungan jangka panjang untuk mengatasi masalah struktural terkait pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Ambang batas dukungan adalah 140% dari kuota, dengan maksimum 185%. Durasi pinjaman antara 5 hingga 12 tahun, dengan bunga antara 0,5% hingga 1% per tahun tanpa biaya tambahan. Persyaratan didasarkan pada dokumen kebijakan pengentasan

kemiskinan yang disusun oleh negara peserta untuk mengoordinasikan pengentasan kemiskinan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

4. Fasilitas Tambahan: Fasilitas ini tersedia jika akses atau pengumpulan sumber daya untuk aktivitas bisnis normal dapat dilakukan selama lebih dari satu tahun. Jangka waktu penyusutan adalah antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan, atau 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun.
5. Diskon 45% untuk Produk Ekspor dan Pasokan Impor Jangka Pendek: Dana ini dialokasikan 45% untuk produk ekspor dan 55% untuk semua item termasuk dua kategori di atas. Durasi pinjaman antara 2 hingga 4 tahun, atau 3 hingga 5 tahun. Tidak ada biaya tambahan karena ini adalah pembayaran pokok saja. Anggota harus menyeimbangkan neraca pembayaran meskipun ada defisit ekspor atau surplus impor.
6. Bantuan Darurat: Terdapat dua jenis bantuan darurat. Pertama, bantuan segera dan jangka menengah untuk menyelesaikan masalah pembayaran akibat bencana seperti banjir atau gempa bumi. Kedua, bantuan untuk menyelesaikan masalah pembayaran akibat kerusakan dan konflik sosial. Jumlah bantuan adalah 25% dari kuota, namun jumlah yang lebih tinggi mungkin tersedia dalam kasus luar biasa. Gaji pokok diberikan tanpa tunjangan tambahan.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Indonesia

Menurut IMF, krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh permintaan dukungan pemerintah kepada IMF setelah nilai tukar rupiah mengalami penurunan signifikan. Rencana pemulihan ekonomi IMF bertujuan untuk memulihkan kepercayaan terhadap mata uang, dengan reformasi sektor keuangan sebagai inti dari setiap rencana pemulihan ekonomi (Fischer 1998b). Pemerintah Indonesia memperbarui perjanjiannya dengan IMF sebanyak enam kali: Perjanjian Tambahan Kedua mengenai Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MEFP) pada 24 Juni, keempat pada 29 Juli 1998, dan terakhir pada 16 Maret 1999.

Program bantuan pertama IMF ditandatangani pada 31 Oktober 1997 dan mencakup empat elemen:

1. Restrukturisasi sektor keuangan,
2. Kebijakan anggaran,
3. Kebijakan moneter,
4. Reformasi struktural.

Untuk mendukung program ini, IMF akan memberikan pinjaman sebesar \$11,3 miliar untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Dari jumlah ini, \$3,04 miliar akan tersedia setelah 15 Maret 1998 jika skema yang disepakati dilaksanakan, sementara sisanya akan dibayar secara bertahap. Dari total pinjaman tersebut, Indonesia memiliki maksimum \$2,07 miliar yang dapat digunakan dari IMF (IMF, 1997: 1). Selain dukungan dari IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara

sahabat juga menjanjikan hibah sebesar \$37 miliar (menurut Hartcher dan Ryan), meskipun dukungan ini terkait dengan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program yang diwajibkan oleh IMF. Sebagai perbandingan, Korea menerima bantuan sebesar \$57 miliar selama tiga tahun; \$21 miliar di antaranya berasal dari IMF. Thailand menerima bantuan sebesar \$17,2 miliar, dengan \$4 miliar dari IMF dan \$0,5 miliar dari Indonesia dan Korea.

Karena proyek-proyek yang diusulkan IMF sering dianggap memberatkan dan sulit dilaksanakan oleh pihak Indonesia, negosiasi lanjutan dilakukan pada 15 Januari yang menghasilkan kesepakatan mengenai reformasi ekonomi (surat penyelidikan); Pada tahun 1998, kesepakatan ini terdiri dari 50 poin. Diharapkan rekomendasi IMF dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin stabilitas nilai tukar rupiah (Pasal 17 Perjanjian IMF tanggal 15 Januari 1998). Manajer program IMF adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan makroekonomi: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan nilai tukar.
- b. Reformasi sektor keuangan: program reformasi perbankan, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan.
- c. Reformasi struktural: perdagangan dan investasi, desentralisasi dan privatisasi, jaminan sosial, dan lingkungan.

Setelah berbagai kendala dalam pelaksanaan amandemen kedua, perundingan dilakukan pada 10 April 1998 yang berujung pada penandatanganan perjanjian tambahan yang terdiri dari 20 pasal, 7 lampiran, dan satu matriks.

Isi perjanjian ini lebih luas dibandingkan dua perjanjian sebelumnya, dan pasal baru mencakup penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Rencana implementasi dicatat dalam matriks kebijakan per program. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah:

1. Stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kekuatan ekonomi Indonesia; Penguatan dan percepatan reformasi sistem perbankan;
2. Penguatan reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang lebih efisien dan efektif;
3. Penyelesaian masalah utang perusahaan swasta;
4. Mengembalikan neraca perdagangan untuk menghidupkan kembali ekspor.

Ketujuh lampiran adalah:

1. Kebijakan moneter dan suku bunga,
2. Perkembangan sektor perbankan,
3. Dukungan APBN untuk kelompok masyarakat kurang mampu,
4. Reformasi dan privatisasi BUMN,
5. Reformasi kelembagaan,

6. Pembaruan utang swasta,
7. Hukum kebangkrutan dan reformasi hukum.

Bagian terpenting dari program IMF adalah restrukturisasi sektor perbankan. Pemerintah akan terus menjamin pinjaman yang menguntungkan bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tambahan dana dari APBN (Pasal 16 dan 20 Lampiran). Pinjaman lain sebesar \$989,4 juta telah disetujui pada awal Mei 1998 dan akan dicairkan pada awal Juni dan awal Juli, kecuali jika pemerintah melaksanakan rencana IMF. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/CEO von Bappenas menekankan bahwa dana dari IMF dan lainnya digunakan untuk mendukung upah rata-rata dan memastikan stabilitas, keamanan, dan kepercayaan pada perekonomian, serta untuk memenuhi komitmen pertama (Kompas, 6 Mei 1998). Dana tambahan akan jatuh tempo pada awal Juni dan tidak akan tersedia hingga awal September.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Sri Lanka

Peran IMF dalam program pemulihan ekonomi Sri Lanka adalah memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Perjanjian Dana Moneter Internasional. Amandemen yang diadopsi pada bulan Juni 1968 memungkinkan IMF memberikan hak penarikan khusus kepada negara-negara anggota untuk membantu mereka memecahkan masalah upah. Mendukung mandat IMF lainnya untuk memandu pemulihan negara. Dalam proses penerimaan bantuan, Sri Lanka sebagai sebuah negara perlu menerapkan berbagai langkah kebijakan sesuai dengan pedoman IMF. Kebijakan ini memerlukan waktu hampir satu tahun untuk diterapkan; Hal ini membuat peran IMF dalam memberikan bantuan dipertanyakan mengingat krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka saat ini. Meskipun IMF saat ini menyetujui penyaluran dana, Sri Lanka memerlukan waktu satu tahun untuk menerima persetujuan ini. Bantuan tersebut akan diberikan secara formal setelah Sri Lanka menandatangani Nota Kesepahaman IMF No. dan IMF juga akan terlibat dalam meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Sri Lanka, sehingga Sri Lanka juga akan menerima bantuan dari Bank Dunia dan bantuan lainnya dari kedua negara. akan mengambil.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Ukraina

Peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam memerangi krisis keuangan di Ukraina sangat penting, terutama dalam konteks permasalahan akibat agresi Rusia. Penjelasan langkah-langkah yang dilakukan IMF adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan darurat dan stabilitas makroekonomi: Pada tahun 2022, IMF menyediakan pembiayaan darurat sebesar \$2,7 miliar melalui Rapid Response Facility (RFI). Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendukung krisis ekonomi dan menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan selama periode IMF.

2. Program Pemantauan dan Pengelolaan (PMB): Hingga akhir tahun 2022, IMF telah menyetujui program PMB yang berdurasi empat bulan. Program ini memungkinkan IMF untuk memantau secara dekat kinerja perekonomian Ukraina dan menjadi dasar program pembiayaan jangka panjang IMF.
3. Dana yang Diperluas (EFF): Pada bulan Maret 2023, IMF menyetujui pendanaan sebesar \$15,6 miliar melalui EFF. Ini adalah program internasional senilai \$115 miliar selama empat tahun, yang bertujuan untuk mendukung kebijakan stabilisasi ekonomi Ukraina, mempercepat pembangunan dan membangun kembali negara tersebut setelah konflik IMF
4. Konsolidasi Reformasi Ekonomi: IMF juga berperan dalam membantu Ukraina merencanakan dan melaksanakan reformasi ekonomi yang komprehensif. Hal ini mencakup reformasi fiskal untuk mengurangi defisit anggaran yang disebabkan oleh proteksionisme dan ketidakpastian, serta langkah-langkah untuk memperkuat kerangka kebijakan moneter dan fiskal (Dewan Luar Negeri).
5. Peningkatan kapasitas dan dukungan teknis: Selain bantuan keuangan, IMF memberikan dukungan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga Ukraina dalam mengelola perekonomian mereka pada saat krisis. Hal ini termasuk bantuan penganggaran, pengelolaan utang dan kebijakan ekonomi lainnya (Dewan Luar Negeri).
6. Bantuan IMF kepada Ukraina merupakan bagian dari upaya internasional yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dan pertumbuhan negara tersebut selama konflik yang sedang berlangsung. Pendekatan multi-fase IMF menggarisbawahi perlunya perubahan dan adaptasi di masa-masa sulit dan penuh tantangan. negara yang tercantum di atas adalah contoh negara- negara yang telah dibantu oleh IMF dalam memerangi krisis ekonomi.

SIMPULAN

Meskipun IMF menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara, IMF berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi ketiga negara tersebut. Di Indonesia, IMF fokus pada reformasi sektor keuangan dan menstabilkan inflasi. Di Sri Lanka, IMF fokus pada penyeimbangan pembayaran bantuan dan reformasi kebijakan ekonomi. Di Ukraina, IMF menyediakan pembiayaan darurat, reformasi keuangan dan bantuan teknis dalam konteks isu-isu terkait konflik. Dalam masing-masing kasus yang berjumlahkasus, peran IMF tidak hanya terbatas pada dukungan keuangan, namun juga memberikan kontribusi pada dukungan teknis dan mendorong reformasi struktural, yang menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dan kebijakan komprehensif untuk menyelesaikan krisis ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, S. (1999). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Asshidiqy, F., Argita, W., Aisy, R., Rizki, R., & Raya, F. (n.d.). *Peran Penting IMF Dalam Stabilisasi dan Pemulihan Ekonomi Global di Tengah Krisis Keuangan Internasional*.
- Chorev, N., & Babb, S. (2009). The crisis of neoliberalism and the future of international institutions: A comparison of the IMF and the WTO. *Theory and Society*, 38(5), 459–484. <https://doi.org/10.1007/s11186-009-9093-5>
- Ginting A P B, H, E. D., & L, D. (2023). *Peran Organisasi Moneter Internasional Dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8232143>
- Indrayani, I. (n.d.). *International Monetary Fund (IMF) dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia*.
- Martín-Navarro, I., Vazdekis, A., La Barbera, F., Falcón-Barroso, J., Lyubenova, M., Ven, G. V. D., Ferreras, I., Sánchez, S. F., Trager, S. C., García-Benito, R., Mast, D., Mendoza, M. A., Sánchez-Blázquez, P., Delgado, R. G., Walcher, C. J., & The CALIFA Team. (2015). IMF– METALLICITY: A TIGHT LOCAL RELATION REVEALED BY THE CALIFA SURVEY. *The Astrophysical Journal*, 806(2), L31. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/806/2/L31>
- Muhammad Rafi Darajati. (2020). Eksistensi Imf, World Bank, Ilo Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional. *JIHK*, 5(2), 44–58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.44>
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1(4), 1–25. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- (ODC), D. P. (2000, April 01). ODC. Retrieved from ODC.: https://www.iatp.org/sites/default/files/Future_Role_of_the_IMF_in_Development_A_n_ODC_T.htm
- Ariyani, R. M., & Harjanto, T. (2018). *Ekonomi Mikro Analisis dan Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bestari, N. P. (2024, Juni 22). *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240622144822-4-548392/10-negara-ini-punya-utang-terbanyak-ke-imf-ada-ri>
- R, M. A., & Harjanto, T. (2018). *Ekonomi Mikro Analisis dan Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- S., R. M., & Harjanto, T. (2018). *Ekonomi Mikro Analisis dan Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.